

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 7
Jenis Rapat	: RDP/RDPU
Dengan	: 1. Dirjen Penanganan Masalah Agraria dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI 2. Kakanwil BPN Provinsi Jawa Timur 3. Dirut Perum Perhutani Prov Jawa Timur 4. Dirut PTPN XII Jawa Timur 5. Para bupati : Blitar, Kediri, Jombang dan Tulungagung 6. Para Kakan BPN Kabupaten Blitar, Kediri, Jombang dan Tulungagung 7. Ketua Umum Ratu Adil
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu , 13 April 2016
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: Membahas terkait konflik pertanahan
Ketua Rapat	: Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 17 Anggota Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

- A. RDP/RDPU Komisi II DPR RI pada hari Rabu , 13 April 2016 dibuka pada pukul 14.35 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan jadwal acara terkait terkait konflik pertanahan di Prov Jawa Timur.
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Dirjen Penanganan Masalah Agraria dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI, Kakanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Dirut Perum Perhutani Prov Jawa Timur, Dirut PTPN XII Jawa Timur, Para bupati : Blitar, Kediri, Jombang dan Tulungagung, Para Kakan BPN Kabupaten Blitar, Kediri, Jombang dan Tulungagung dan Ketua Umum Ratu Adil untuk memberikan pemaparannya dan mempersilakan kepada Anggota Komisi II DPR RI untuk memberikan tanggapan dan masukan.

II. CATATAN

- A. Masyarakat Rakyat Tuntut Keadilan (Ratu Adil) menyampaikan permasalahan terkait dengan kepemilikan tanah mereka yang dikuasai oleh Perhutani dan PTPN XII. Masyarakat menuntut agar tanah yang disengketakan segera di lepaskan dan ditetapkan menjadi tanah masyarakat.
- B. Komisi II DPR RI meminta kepada pihak-pihak yang bersengketa yaitu BPN Jawa Timur, BPN Blitar, Kediri, Jombang dan Pemda Jawa Timur : Blitar, Kediri dan Jombang untuk melengkapi data-data dan bukti-bukti yang akurat guna memudahkan Komisi II DPR RI mencari solusi terhadap permasalahan tanah ini.
- C. Komisi II DPR RI akan menyelesaikan masalah ini paling lambat dua bulan dengan memanggil semua pihak yang terkait sehingga masalah ini cepat selesai dan masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.15 WIB.

Jakarta, 13 April 2016
Wakil Ketua Komisi II DPR RI

ttd

Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA
A-345